



KEMENTRIAN KOPERASI
DAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RANHIR PERUBAHAN RENJA OPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

~~DINAS PERANAMAN MODAL, PERIZINAN~~
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SUNGAILIAT
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
E-mail : dinamp2kukm@gmail.com website : <http://dinamp2kukm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR:188.4/ //DINPMP2KUKM/2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 360 dan 363 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021.
 - b. Merumuskan, menyusun serta menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021.
 - c. Melakukan revisi / perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) sesuai ketentuan.
 - d. Melaporkan hasil penyusunan kepada Kepala Badan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**



RESTUNEMI

Tembusan :

- 1.Yth. Bupati Bangka di Sungailiat.
- 2.Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka di Sungailiat.
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/ /DINPMP2KUKM/2021
TANGGAL : 02 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)
DIDINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. **Ketua** : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
2. **Sekretaris** : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka
3. **Anggota** :
 1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 2. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 4. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;
 5. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka;

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 02 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,**



RESTUNEMI

KATA PENGANTAR

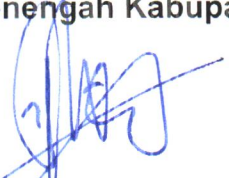
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, kasih dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 ini disusun dalam rangka perwujudan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta yang akan datang guna mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Perubahan Rencana Kerja OPD ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (**Good Governance**) guna perwujudan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan semoga Laporan Rencana Kerja OPD ini membawa manfaat positif bagi jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya serta Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai stakeholdernya.

Sungailiat, Agustus 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Bangka,**



**Hj. Restunemi, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196504231992032003**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
HALAMAN	
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	7
S.D TRIWULAN II DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021	
2.1 Skala nilai Predikat Kinerja Perangkat Daerah	
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2021	
2.3 Kinerja Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2021	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021	
BAB IV PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA PD adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah dalam tahun berkenaan yang sebagaimana disusun berdasarkan Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas: Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - a. UU No.25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang *penanaman modal*.

Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka. Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, maka dibutuhkan perencanaan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan rencana kerja dari OPD yang bersangkutan setiap tahunnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 nomor 3 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah KabupatenBangka Tahun 2019 Nomor 102);
 8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 42)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk dijadikan :

- a. Alat koordinasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.
- b. Untuk membangun koordinasi perencanaan penanaman modal yang efektif dalam kerangka sinergitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian penanaman modal.

- c. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2021
- 2.2 Kinerja Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

- 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2021

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 303 menyatakan bahwa : Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah, Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kepada bupati melalui kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 304 menyatakan bahwa : Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

ketentuan yang mengatur mengenai capaian kinerja dan penyerapan anggaran. Secara detail predikat capaian kinerja program dijabarkan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Skala Nilai Predikat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	ST
2	76% ≤ 90%	Tinggi	T
3	66% ≤ 75%	Sedang	S
4	51% ≤ 65%	Rendah	R
5	≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II (dua) Tahun 2021 dapat disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

2.2 Kinerja Fisik dan Keuangan Sampai dengan Triwulan II (Dua) Taun 2021

Realisasi kinerja fisik dan keuangan untuk Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3 dibawah ini:

TABEL 2.3
REALISASI KINERJA FISIK DAN KEUANGAN S/D TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
			FISIK (%)	KEU(Rp)	KEU %	SISA ANGGARAN
1	2	3	10	11	12	13
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 5.366.538.400	43,40	Rp 2.328.898.877	43,40	Rp 3.037.639.523
B.	BELANJA LANGSUNG	Rp 2.383.390.000	24,18	Rp 522.284.701	21,91	Rp 1.861.105.299
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 12.983.950	0,00	Rp 970.000	7,47	Rp 12.013.950
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp 12.983.950	0,00	Rp 970.000	7,47	Rp 12.013.950
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp 12.983.950	0,00	Rp 970.000	7,47	Rp 12.013.950
	- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 300.000	0,00	Rp 0	0,00	Rp 300.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.336.050	0,00	Rp 0	0,00	Rp 3.336.050
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp 380.000	0,00	Rp 0		Rp 380.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.200.000	0,00	Rp 0	0,00	Rp 1.200.000
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp 747.900	0,00	Rp 0	0,00	Rp 747.900
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 5.740.000	16,90	Rp 970.000	16,90	Rp 4.770.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 1.280.000	0,00	Rp 0	0,00	Rp 1.280.000
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 118.406.500	0,00	Rp 0	0,00	Rp 118.406.500
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /	Rp 118.406.500	0,00	Rp 0	0,00	Rp 118.406.500

	Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten / Kota								
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	118.406.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp	118.406.500
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	230.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	230.000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Rp	25.850.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	25.850.000
	- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	12.839.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp	12.839.500
	- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp	1.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.500.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp	760.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	760.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	0	0	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	1.538.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.538.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	49.400.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	49.400.000
	- Belanja Lembur	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	20.350.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	20.350.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	5.439.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.439.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	500.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp	141.413.300		Rp	0	0,00	Rp	141.413.300
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rp	141.413.300		Rp	0	0,00	Rp	141.413.300
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Rp	141.413.300	0,00	Rp	0	0,00	Rp	141.413.300

	Kompetensi SDM Koperasi								
	- Belanja Honorarium	Rp	230.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	230.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	10.264.100	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.264.100
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp	760.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	760.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	1.620.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.620.200
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Souvenir / Cenderamata	Rp	2.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	48.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	48.000.000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Rp	25.950.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	25.950.000
	- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp	26.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	26.000.000
	- Belanja Lembur	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Peralatan Mesin	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	19.300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	19.300.000
	- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp	1.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.500.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	5.439.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.439.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	350.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	350.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	70.301.550	12,30	Rp	8.650.000	12,30	Rp	61.651.550
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp	70.301.550	12,30	Rp	8.650.000	12,30	Rp	61.651.550
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp	43.544.250	19,86	Rp	8.650.000	19,86	Rp	34.894.250
	- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis	Rp	900.000	0,00	Rp	0	0,00		900.000

	Kegiatan								
-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	7.186.400	0,00	Rp	0	0,00	Rp	7.186.400
-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp	1.768.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.768.000
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	2.100.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.100.000
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	2.584.850	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.584.850
-	Belanja Lembur	Rp	5.160.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.160.000
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	13.720.000	63,05	Rp	8.650.000	63,05	Rp	5.070.000
-	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	10.125.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.125.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp	13.270.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp	13.270.500
-	Belanja Honorarium	Rp	450.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	450.000
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	1.292.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.292.500
-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp	380.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	380.000
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	119.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	119.000
-	Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	1.009.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.009.000
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.000.000
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	500.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	1.640.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.640.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	2.880.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.880.000
-	Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	3.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	3.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp	13.486.800	0,00	Rp	0	0,00	Rp	13.486.800
-	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	450.000
-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	1.078.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.078.700
-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	228.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	228.000

	Kertas dan Cover								
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	1.150.100	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.150.100
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.550.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.550.000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Rp	3.700.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	3.700.000
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	1.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	1.230.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.230.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	1.600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.600.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	130.484.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	130.484.200
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rp	130.484.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	130.484.200
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi	Rp	130.484.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	130.484.200
	- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	230.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	230.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	7.954.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	7.954.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp	760.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	760.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	1.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.000.000
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp	1.290.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.290.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja / Bahan untuk Kegiatan Kantor Souvenir / Cenderamata	Rp	1.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	48.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	48.000.000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	Rp	23.750.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	23.750.000
	- Honorarium Penyuluhan atau	Rp	26.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	26.000.000

	Pendampingan								
	- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp	1.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.500.000
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	16.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	16.500.000
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	2.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	500.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	1.074.409.100	36,71	Rp	394.433.187	36,71	Rp	679.975.913
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000	28,80	Rp	1.440.000	28,80	Rp	3.560.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000	28,80	Rp	1.440.000	28,80	Rp	3.560.000
	- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	300.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	380.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	380.000
	- Belanja Lembur	Rp	4.320.000	33,33	Rp	1.440.000	33,33	Rp	2.880.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	51.586.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	51.586.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	9.100.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	9.100.000
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	300.000
	- Belanja Pakaian Olahraga	Rp	8.800.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	8.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	42.486.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	42.486.000
	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	42.486.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	42.486.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	63.681.000	14,31	Rp	9.115.000	14,31	Rp	54.566.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp	63.681.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	63.681.000

Konsultasi SKPD							
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 300.000
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	53.781.000	15,04	Rp	8.090.000	15,04	Rp 45.691.000
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	9.600.000	10,68	Rp	1.025.000	10,68	Rp 8.575.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	43.499.900	0,00	Rp	0	0,00	Rp 43.499.900
Pengadaan Mebel	Rp	12.732.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp 12.732.700
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 300.000
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp	3.594.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp 3.594.500
- Belanja Modal Meja / Kursi Kerja / Rapat Pejabat	Rp	8.838.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp 8.838.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.767.200	0,00		0	0,00	30.767.200
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 300.000
- Belanja Modal Alat Pendingin	Rp	7.074.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 7.074.000
- Belanja Modal Rumah Tangga Lainnya	Rp	1.969.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 1.969.000
- Belanja Modal Personal Komputer	Rp	18.690.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 18.690.000
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp	2.734.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp 2.734.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	733.907.200	58,57	Rp	316.060.898	43,07	Rp 417.846.302
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	580.736.600	51,45	Rp	251.460.550	43,30	Rp 329.276.050
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	245.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp 245.000
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	8.282.600	32,93	Rp	2.727.850	32,93	Rp 5.554.750
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover	Rp	1.900.000	68,42	Rp	1.300.000	68,42	Rp 600.000
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp	8.109.000	55,65	Rp	4.512.600	55,65	Rp 3.596.400
- Belanja Tenaga Administrasi	Rp	238.950.000	50,00	Rp	103.500.000	43,31	Rp 135.450.000
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp	238.950.000	50,00	Rp	103.500.000	43,31	Rp 135.450.000
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp	26.550.000	50,00	Rp	11.500.000	43,31	Rp 15.050.000
- Belanja Jasa Tenaga Caraka	Rp	26.550.000	50,00	Rp	11.500.000	43,31	Rp 15.050.000

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non Asn	Rp	31.200.000	50,00	Rp	12.920.100	41,41	Rp	18.279.900
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	95.872.000	39,94	Rp	41.041.946	42,81	Rp	54.830.054
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	165.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	165.000
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	912.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	912.000
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Rp	4.492.300	100,00	Rp	4.418.700	98,36	Rp	73.600
- Belanja Tagihan Air	Rp	6.400.000	41,67	Rp	2.401.860	37,53	Rp	3.998.140
- Belanja Tagihan Listrik	Rp	68.902.700	41,67	Rp	25.801.448	37,45	Rp	43.101.252
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp	15.000.000	41,67	Rp	8.419.938	56,13	Rp	6.580.062
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	57.298.600	38,44	Rp	23.558.402	41,12	Rp	33.740.198
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	300.000
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp	178.600	0,00	Rp	0	0,00	Rp	178.600
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	53.100.000	50,00	Rp	23.000.000	43,31	Rp	30.100.000
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp	600.000	50,00	Rp	300.000	50,00	Rp	300.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	3.120.000	99,60	Rp	258.402	8,28	Rp	2.861.598
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	176.735.000	38,37	Rp	67.817.289	38,37	Rp	108.917.711
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	159.660.000	39,14	Rp	67.817.289	42,48	Rp	91.842.711
- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	150.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	150.000
- Belanja Jasa Tenaga Sopir	Rp	83.250.000	50,00	Rp	35.875.000	43,09	Rp	47.375.000
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non Asn	Rp	4.680.000	33,33	Rp	1.938.015	41,41	Rp	2.741.985
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	71.580.000	41,92	Rp	30.004.274	41,92	Rp	41.575.726
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	6.910.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	6.910.000

	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	150.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	150.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp	6.760.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	6.760.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	10.165.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.165.000
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	165.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	165.000
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Rp	10.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		122.163.500	6,72	Rp	8.211.514	6,72		113.951.986
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Rp	122.163.500	6,72	Rp	8.211.514	6,72	Rp	113.951.986
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp	104.159.800	7,88	Rp	8.211.514	7,88	Rp	95.948.286
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	690.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	690.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	6.460.300	0,00	Rp	0	0,00	Rp	6.460.300
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover	Rp	795.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	795.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	13.548.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	13.548.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp	2.975.300	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.975.300
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	3.600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	3.600.000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	10.410.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.410.000
	- Belanja Honorarium Penyuluh atau Pendampingan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp	20.000.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	20.000.000
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	13.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	13.500.000

	- Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	23.681.000	34,68	Rp	8.211.514	34,68	Rp	15.469.486
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	8.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	8.500.000
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Rp	18.003.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	18.003.700
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	600.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	4.946.900	0,00	Rp	0	0,00	Rp	4.946.900
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover	Rp	309.300	0,00	Rp	0	0,00	Rp	309.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	1.502.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.502.000
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp	405.500	0,00	Rp	0	0,00	Rp	405.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	10.240.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	10.240.000
8	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	69.716.000	1,76	Rp	1.230.000	1,76	Rp	68.486.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	69.716.000	1,76	Rp	1.230.000	1,76	Rp	68.486.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp	69.716.000	1,76	Rp	1.230.000	1,76	Rp	68.486.000
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	600.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	5.281.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.281.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	5.875.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.875.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	57.960.000	2,12	Rp	1.230.000	2,12	Rp	56.730.000
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	219.570.000	38,58	Rp	84.720.000	38,58	Rp	134.850.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp	219.570.000	38,58	Rp	84.720.000	38,58	Rp	134.850.000
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Rp	219.570.000	38,58	Rp	84.720.000	38,58	Rp	134.850.000

	Modal								
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	920.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	920.000
	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	137.700.000	49,24	Rp	67.800.000	49,24	Rp	69.900.000
	- Belanja Lembur	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	17.150.000	17,61	Rp	3.020.000	17,61	Rp	14.130.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	63.800.000	21,79	Rp	13.900.000	21,79	Rp	49.900.000
10	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	377.488.200	6,38	Rp	24.070.000	6,38	Rp	353.418.200
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	377.488.200	6,38	Rp	24.070.000	6,38	Rp	353.418.200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	99.666.200	8,89	Rp	8.860.000	8,89	Rp	90.806.200
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	600.000
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	3.827.200	0,00	Rp	0	0,00	Rp	3.827.200
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	6.124.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	6.124.000
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Hotel	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	22.500.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	22.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	51.990.000	8,67	Rp	4.510.000	8,67	Rp	47.480.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	14.625.000	29,74	Rp	4.350.000	29,74	Rp	10.275.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	96.600.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	96.600.000
	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	1.900.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	1.900.000

	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	41.400.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	41.400.000
	- Belanja Sewa Hotel	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	53.300.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	53.300.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Rp	181.222.000	8,39	Rp	15.210.000	8,39	Rp	166.012.000
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	14.462.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	14.462.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp	8.400.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	8.400.000
	- Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	Rp	12.900.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	12.900.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	87.360.000	17,41	Rp	15.210.000	17,41	Rp	72.150.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp	58.100.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	58.100.000
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Sewa Hotel	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	0	0,00	Rp	0	0,00	Rp	0
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	46.453.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	46.453.700
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Rp	46.453.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	46.453.700
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Rp	46.453.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	46.453.700
	- Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	150.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	150.000

- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	34.115.700	0,00	Rp	0	0,00	Rp	34.115.700
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover	Rp	4.808.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	4.808.000
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp	2.100.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	2.100.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	5.280.000	0,00	Rp	0	0,00	Rp	5.280.000
Jumlah	Rp	7.749.928.400	39,70	Rp	2.851.183.578	36,79	Rp	4.898.744.822

Realisasi kinerja fisik dan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sampai dengan Triwulan II (Dua) per 30 Juni 2021 sebagaimana disajikan pada tabel diatas, dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.7.749.928.400 realisasi keuangan/ penyerapan anggaran hanya sebesar Rp. 2.851.183.578 atau 36,79% dengan realiasi kinerja fisik kegiatan sebesar 39,70% , hal ini menunjukkan nilai predikat kinerja dinilai Sangat Rendah (SR).

Faktor penyebab rendahnya kinerja fisik dan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Terjadinya pergeseran beberapa kegiatan, sehingga rencana proses pengadaan barang dan jasa juga mengalami penyesuaian.
2. Jadwal kegiatan ada yang bervariasi sesuai dengan jadwal kegiatan dimasing-masing bidang dengan ketersediaan anggaran kas yang tersedia yang direncanakan di masing masing triwulan.
3. Penyesuaian terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih belum maksimal dipahami sehingga masih perlu dilakukan backup data melalui sistem aplikasi SIMDA keuangan, sehingga menjadi hambatan dalam proses Penatausahaan dan pelaksanaan belanja oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Sebagian kegiatan yang sudah dilaksanakan masih dalam proses pengadaan, akan tetapi belum dilakukan proses pembayaran sehingga belum terealisasi di dalam Laporan Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA
S.D TRIWULAN II PERIODE PELAKSANAAN 2021

No	Kategori	Kode	Uraian Kegiatan/Program/Proyek/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana Pelaksanaan Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja (Berkas lengkap dengan Rincian Tahun 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian Perangkat Daerah yang Diusulkan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rincian Perangkat Daerah 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						K		Rp		K		Rp		K		Rp		K				Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			UKURAN PEMERINTAHAN BIDANG PERANGKAT DAERAH KECIL DAN MENENGAH		1.172.295.100		1.085.741.000				9.820.000				9.820.000		9.820.000		9.820.000	0,82				
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas A	17.03	PROGRAM PENGAWARAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Berkualitas A	100	52.840.700		71	48.037.000	0,00		2,02	970.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000	71	970.000	71	1,84	DINPMP2KUKM
		17.03.2	Pemeriksaan dan Penguasaan Koperasi/Koperasi Simpan Pinjaman / Unit	Persentase Pembinaan Koperasi	100	62.840.700		71	48.037.000	0,00		2,02	970.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000	71	970.000	71	1,84	
		17.03.2.01	Pengawasan Kelautan, Kesehatan, Kehutanan, Ketunggalan, serta Akutabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Melampaui RKT	73	52.840.700		71	48.037.000	0,00		2,02	970.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000	71	970.000	97	1,84	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00										97	1,84		
										Predikat Kinerja	SR										SR	SR		
2	Meningkatnya Koperasi Berkualitas A	17.04	PROGRAM PERILALAS KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Berkualitas A	100	31.581.000		100	28.710.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			100	100	0,00	DINPMP2KUKM	
		17.04.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjaman / Unit Simpan Pinjaman Koperasi yang Wilayah Kerangkaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan Koperasi	100	31.581.000		71	28.710.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			71	71	0,00		
		17.04.2.01	Pelaksanaan Peminaan Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Motivasi Usaha Mikro	73	31.581.000		71	28.710.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			71	-	97	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00										-	-	97	0,00
										Predikat Kinerja	SR										SR	SR		
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas A	17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Berkualitas A	100	250.785.700		100	227.987.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			100	100	0,00	DINPMP2KUKM	
		17.05.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Kerangkaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Koperasi	100	250.785.700		71	227.987.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			71	71	0,00		
		17.05.2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi Sifat Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang Memiliki Kompetensi	73	250.785.700		71	227.987.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			71	-	97	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00										-	-	97	0,00
										Predikat Kinerja	SR										SR	SR		
4	Meningkatnya Omset Usaha Mikro	17.07	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	100	436.238.900		100	396.599.000	0,00		2,18	8.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00			100	8.650.000	100	1,98	DINPMP2KUKM
		17.07.2	Pemerdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendekatan Kemudahan, Kemudahan Partisipasi, Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan para Pemangku Keperintahan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	100	436.238.900		85	396.599.000	0,00		2,18	8.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00			85	8.650.000	85	1,98	
		17.07.2.01	Pendataan Potensi dan Pengalangan Modal Mikro	Jumlah Motivasi Usaha Mikro	87	36.881.000		85	31.715.000	0,00		10,73	8.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00			85	8.650.000	08	15,31	
		17.07.2.01.01	Pendataan dan Pembinaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendukung Usaha Mikro	87	295.000.000		85	268.200.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			85	-	08	0,00	
		17.07.2.01.02	Kemudahan dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Keperintahan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Memiliki Kompetensi	87	86.357.900		85	76.689.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			85	-	08	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00										-	-	98	15,21
										Predikat Kinerja	SR										SR	SR		
5	Meningkatnya Omset Usaha Mikro	17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	100	400.848.800		100	364.408.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			100	-	100	0,00	DINPMP2KUKM
		17.08.2	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	100	400.848.800		80	364.408.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			80	-	80	0,00	
		17.08.2.01	Pembinaan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produk dan pengalangan modal, SDM, serta akses teknologi	Jumlah Fasilitas Usaha Mikro	83	400.848.800		80	364.408.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			80	-	96	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00										-	-	96	0,00
										Predikat Kinerja	SR										SR	SR		
			UKURAN PEMERINTAHAN BIDANG PERANGKAT DAERAH		18.967.600.000		19.800.410.000	7,96	1.019.641.091	22,18	2.341.563.578	0,00	0,00	0,00	0,00		2.341.563.578	100	2.341.563.578	100	20,94		DINPMP2KUKM	
6	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaksanaan Perangkat Daerah	18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	8.201.600.000		100	7.493.400.000	13,61	1.019.641.091	36,34	2.723.332.064	0,00	0,00	0,00	0,00		2.723.332.064	100	2.723.332.064	100	33,21	
		18.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	100	99.000.000		86	35.000.000	0,00		4,11	1.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00		1.440.000	86	1.440.000	86	3,69	
		18.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang terusun	88	33.000.000		85	30.000.000	0,00		4,80	1.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00		1.440.000	85	1.440.000	97	4,36	
		18.01.2.01.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Kinerja yang terusun	88	6.000.000		85	5.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	85	-	97	0,00	
		18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI	100	6.500.000.000		100	4.000.000.000	16	905.339.443	38,81	2.328.898.877	0,00	0,00	0,00	0,00		2.328.898.877	86	2.328.898.877	97	35,83	
		18.01.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terpenuhi	100	6.500.000.000		100	6.000.000.000	15	905.339.443	38,81	2.328.898.877	0,00	0,00	0,00	0,00		2.328.898.877	100	2.328.898.877	100	35,83	
		18.01.3.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Profesionalisasi Aparatur Perangkat Daerah	100	109.500.000		100	93.400.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	100	-	100	0,00	
		18.01.2.05	Pengadaan Paksiun Dinas beserta Attribut Kelengkapannya	Jumlah Paksiun Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	87	32.000.000		85	42.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	85	-	98	0,00	
				Jumlah Paksiun Olahraga	87	8.000.000		85	6.400.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	85	-	98	0,00	

Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DAN BELUMNYA PROGRAM (PT)		19.293.161,000	39	1.019.641,091	0,00	2.861.183,578	-	0,00	-	-	-	-
Rate Rata Rata Capaian Kinerja Seluruh Program (PT) (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja Seluruh Program (PT)		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rate Rata Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preflikat Kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR

Foto dan Pengambilan Perhitungan Kinerja
 (Terdapat lampiran yang menunjukkan dokumen pendukung dan bukti-bukti lainnya)
 (Ditandatangani Kepala Bidang)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dan Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021. Pada Perubahan Renja ini dilakukan perubahan terhadap komposisi program, kegiatan dan sub kegiatan baik berupa penambahan maupun pengurangan anggaran program, kegiatan dan penambahan serta pengurangan sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja yang telah dilakukan sehingga pada Perubahan RENJA tahun 2021, pagu anggaran untuk melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 mengalami penambahan yaitu sebesar Rp. 230.325.000,00 dari Pagu anggaran induk sebelumnya yakni sebesar Rp. 7.749.928.400,00 sehingga Pagu anggaran yang dibutuhkan pada Perubahan RENJA tahun 2021 sebesar Rp. 7.980.253.400,00-.

Perubahan rincian terhadap komposisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan atas penambahan maupun pengurangan pagu anggaran pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1 dibawah ini :

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
KABUPATEN BANGKA**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.440.947.500,00			6.671.272.500,00	230.325.000,00	
		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	25,50		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26,00			
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12,50		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12,75			
2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	5.000.000,00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%	5.000.000,00	-	
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100%			
2.17.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	10 Dokumen	5.000.000,00	Jumlah laporan kinerja yang disusun	10 Dokumen	5.000.000,00		
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0%			
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	100%	5.366.538.400,00	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	100%	5.366.538.400,00	-	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun Sesuai Standar	100%			

2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	5.366.538.400,00	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	5.366.538.400,00	-	
		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen			
		Indeks Profesionalisme Aparatur	59,20		Indeks Profesionalisme Aparatur	70,15			
2.17.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi	23,81%	51.586.000,00	Persentase Aparatur yang memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi	23,81%	51.586.000,00	-	
		Persentase Aparatur yang Bekerja Tepat Waktu	100%		Persentase Aparatur yang Bekerja Tepat Waktu	100%			
		Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%		Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%			
2.17.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dimas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel	9.100.000,00	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	16 Stel	9.100.000,00	-	
2.17.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang (5 Laki-Laki dan 5 Perempuan)	42.436.000,00	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang (5 Laki-Laki dan 5 Perempuan)	42.436.000,00		
		Indeks Sarana dan Prasarana	100		Indeks Sarana dan Prasarana	100			
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,85		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,85			
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	63.681.000,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	130.416.000,00	66.735.000,00	
2.17.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	63.681.000,00	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang tertangani	12 Bulan	130.416.000,00	66.735.000,00	
		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman kantor yang tertangani	12 Bulan			
2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	43.499.900,00	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	43.499.900,00	-	
2.17.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1 Paket	12.732.700,00	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1 Paket	12.732.700,00	-	
2.17.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	30.767.200,00	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	30.767.200,00	-	

2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan	100%	733.907.200,00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan	100%	733.907.200,00	-	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
2.17.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	580.736.600,00	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	12 Bulan	580.736.600,00	-	
2.17.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	95.872.000,00	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	95.872.000,00	-	
2.17.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	57.298.600,00	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	57.298.600,00	-	
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	176.735.000,00	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	340.325.000,00	163.590.000,00	
8.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 Unit Mobil, 16 Unit Motor	159.660.000,00	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 Unit Mobil, 17 Unit Motor	260.305.000,00	100.725.000,00	
2.17.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	6.910.000,00	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	54.940.000,00	48.030.000,00	
2.17.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	10.165.000,00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	14.835.000,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			12.983.950,00			12.983.950,00		
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	76,10%		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	85,85%			
2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Koperasi	76,10%	12.983.950,00	Persentase Pembinaan Koperasi	85,85%	12.983.950,00	-	
2.17.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	100 Koperasi	12.983.950,00	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	100 Koperasi	12.983.950,00	-	

2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			130.237.900,00			130.237.900,00		
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	76,10%		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	85,85%			
2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Koperasi	76,10%	130.237.900,00	Persentase Pembinaan Koperasi	85,85%	130.237.900,00		-
2.17.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Sehat dan taat Regulasi	100 Koperasi	130.237.900,00	Jumlah Koperasi Yang Sehat dan taat Regulasi	100 Koperasi	130.237.900,00		-
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			144.053.050,00			144.053.050,00		
		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	76,10%		Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A	85,85%			
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang pengurusnya sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	29,49%	144.053.050,00	Persentase koperasi yang pengurusnya sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	27,32%	144.053.050,00		-
2.17.05.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus Koperasi yang memiliki Kompetensi	70 Orang	144.053.050,00	Jumlah pengurus Koperasi yang memiliki Kompetensi	70 Orang	144.053.050,00		-
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			41.125.700,00			41.125.700,00		
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	66,67%		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	100%			
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	10%	41.125.700,00	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	12%	41.125.700,00		-
2.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah laporan pendataan potensi dan pengembangan usaha UMKM yang disusun	17 laporan	14.368.400,00	Jumlah laporan pendataan potensi dan pengembangan usaha UMKM yang disusun	17 laporan	14.368.400,00		-

2.17.07.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM naik kelas	100 UMKM terlatih	13.270.500,00	Jumlah UMKM naik kelas	100 UMKM terlatih	13.270.500,00	-	
2.17.07.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	17 Kali	13.486.800,00	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	17 Kali	13.486.800,00	-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			145.188.900,00			145.188.900,00		
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	66,67%		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	100,00%			
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	10%	145.188.900,00	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro	12%	145.188.900,00	-	
2.17.08.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro	17 Kali	145.188.900,00	Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro	17 Kali	145.188.900,00	-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			137.643.500,00			137.643.500,00		
		Persentase jumlah investor	35,00%		Persentase jumlah investor	36,00%			
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Investasi Daerah yang sudah dipetakan	100%	137.643.500,00	Persentase Potensi Investasi Daerah yang sudah dipetakan	100%	137.643.500,00	-	
2.18.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	119.639.800,00	Jumlah Data Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	119.639.800,00	-	
2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah	Buku Peta Potensi dan Peluang Investasi	18.003.700,00	Jumlah Peta Potensi Dan Peluang Investasi Daerah	1 Dokumen	18.003.700,00	-	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			69.716.000,00			69.716.000,00		
		Persentase jumlah investor	35,00%		Persentase jumlah investor	36,00%			

2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti	100%	69.716.000,00	Persentase Pameran Investasi Yang Diikuti	100%	69.716.000,00	-	
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan	4 Kali	69.716.000,00	Jumlah Pameran Investasi yang dilaksanakan	4 Kali	69.716.000,00	-	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			219.570.000,00			219.570.000,00		
		Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu	100%		Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diselesaikan Dengan Standar Waktu	100%			
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan	100%	219.570.000,00	Persentase Perizinan Yang Memenuhi Persyaratan	100%	219.570.000,00		
		Jumlah Money Yang Dilakukan	350 objek izin usaha		Jumlah Money Yang Dilakukan	350 objek izin usaha			
		Persentase Pengaduan Masuk yang ditindaklanjuti	100%		Persentase Pengaduan Masuk yang ditindaklanjuti	100%			
2.18.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Survey yang dilaksanakan	350 objek izin usaha	219.570.000,00	Jumlah Survey yang dilaksanakan	350 objek izin usaha	219.570.000,00	-	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			362.008.200,00			362.008.200,00		
		Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM	35,00%		Persentase Perusahaan Taat Melaporkan LKPM	36,00%			
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	200 Perusahaan	362.008.200,00	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250 Perusahaan	362.008.200,00	-	
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali			
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal	1 Buku LKPM	99.672.000,00	Jumlah Bahan / Data Pemantauan Penanaman Modal	1 Buku LKPM	99.672.000,00		
2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM	1 Data	181.216.200,00	Jumlah Bahan / Data Laporan Hambatan keterlambatan LKPM	1 Data	181.216.200,00	-	
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bahan / Data Pengawasan Penanaman Modal	1 Data	81.120.000,00	Jumlah Bahan / Data Pengawasan Penanaman Modal	1 Data	81.120.000,00	-	

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			46.453.700,00			46.453.700,00		
		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	100%		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	100%			
		Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100%		Persentase Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100%			
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan	30%	46.453.700,00	Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan	40%	46.453.700,00		
		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan	100%		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang memiliki aptitude Pelayanan Dan Keahlian Di Bidang Perizinan	100%			
		Persentase Ketersediaan Informasi Online	100%		Persentase Ketersediaan Informasi Online	100%			
2.18.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Bahan Publikasi ke Publik	5 Dokumen	46.453.700,00	Jumlah Bahan Publikasi ke Publik	5 Dokumen	46.453.700,00		
		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Perizinan	2 Paket		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Perizinan	1 Unit			
		Jumlah SDM yang mengikuti aptitude Pelayanan Perizinan	2 Orang		Jumlah SDM yang mengikuti aptitude Pelayanan Perizinan	1 Orang			
		Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi Pelayanan Perizinan	2 Orang		Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi Pelayanan Perizinan	1 Orang			
				7.749.928.400,00			7.980.253.400,00	230.325.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode tahun 2021 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan RKA pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. Tahun 2021 disusun guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar evaluasi hasil rencana kinerja dan keuangan untuk periode tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2021 secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan Tahun 2019 dan 2020.

4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Kapasitas SDM yang masih terbatas
- b. Belum ada jabatan fungsional penanaman modal
- c. Ketersediaan dan akses data yang belum optimal
- d. Lemahnya koordinasi dan integrasi antar lini.

4.2. Kaidah Pelaksanaan.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM